Jurnal Kewirausahaan dan Multi Talenta (JKMT)
E-ISSN : 2962-8873
P-ISSN : 2964-6049
+62 811 7404 445 https://siberpublisher.org/ siberpublisher.info@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38035/jkmt.v4i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 14 Oktober 2026 | **Revised:** 30 Oktober 2026 | **Accepted:** 14 November 2026

Pengelolaan Pasar Obor dalam Pemberdayaan Ekonomi Jemaat di Kota Sorong Papua Barat Daya

Chezia Gabriela Supusepa[1], Izak Y. M. Lattu[2]
[1]Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, 912025015@student.uksw.edu
[2]Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, izak.lattu@uksw.edu

Corresponding Author: izak.lattu@uksw.edu[2]

Abstract: *Economic empowerment through church ministry requires structured and sustainable management, rather than merely providing financial assistance and business facilities. Previous studies have examined economic empowerment through local resource development, financial assistance, training, and church asset utilization. However, studies integrating the management functions of church-based market programs with their supporting and inhibiting factors, as well as their impacts on congregational economic empowerment, remain limited. This study aims to analyze the management of Pasar Obor, identify its supporting and inhibiting factors, and examine its impact on the economic empowerment of the congregation at GKI Ekklesia Klasaman, Sorong City, Southwest Papua. This study employed a descriptive qualitative approach with purposively selected informants. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed descriptively. The findings indicate that management encompasses planning, organizing, actuating, and controlling, but these functions are not yet optimally integrated due to limitations in operational guidelines, business mentoring, and evaluation of participants' progress. The program is supported by church leadership, facilities, local resources, and congregational solidarity, but faces challenges related to inconsistent vendor participation, unstable market demand, and limited capital. Pasar Obor has provided some congregants with opportunities to develop their businesses and increase their income, while also strengthening solidarity and fellowship. The novelty of this study lies in its analysis of the relationship between the management functions of a church-based market, the process of economic empowerment, and congregational fellowship.*

Keywords: *Management, Pasar Obor, Congregational Economic Empowerment, Sorong City.*

Abstrak: Pemberdayaan ekonomi jemaat melalui pelayanan gereja membutuhkan pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan, bukan hanya penyediaan bantuan dan fasilitas usaha. Penelitian terdahulu telah membahas pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan potensi lokal, bantuan modal, pelatihan, dan pemanfaatan aset gereja. Namun, kajian yang mengintegrasikan fungsi pengelolaan program ekonomi berbasis pasar dengan faktor pendukung, penghambat, dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi jemaat masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Pasar Obor, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi jemaat di GKI

Ekklesia Klasaman, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pemilihan informan secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan telah mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, tetapi belum terintegrasi secara optimal karena keterbatasan pedoman operasional, pendampingan usaha, dan evaluasi perkembangan peserta. Program didukung oleh kepemimpinan gereja, fasilitas, potensi sumber daya lokal, dan solidaritas jemaat, tetapi terkendala ketidakkonsistenan sebagian pedagang, permintaan pasar yang tidak stabil, serta keterbatasan modal. Pasar Obor telah membuka kesempatan bagi sebagian jemaat untuk mengembangkan usaha dan pendapatan, sekaligus memperkuat solidaritas dan persekutuan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan fungsi pengelolaan pasar gerejawi dengan proses pemberdayaan ekonomi dan kehidupan persekutuan jemaat.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pasar Obor, Pemberdayaan Ekonomi Jemaat, Kota Sorong.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan sosial yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan individu maupun kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas kesejahteraannya (Sarpin et al., 2025). Kondisi tersebut bersifat multidimensional karena berhubungan dengan terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kesempatan yang diperlukan untuk mengembangkan kehidupan secara lebih baik (Ika et al., 2022). Keterbatasan tersebut dapat menyebabkan kelompok masyarakat rentan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan kemampuan ekonomi secara mandiri (Leuhery et al., 2023).

Persoalan kemiskinan tersebut masih menjadi tantangan pembangunan di Indonesia, khususnya di wilayah Papua Barat Daya yang memiliki persentase penduduk miskin relatif tinggi dibandingkan dengan sejumlah provinsi lainnya (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, persentase penduduk miskin di Papua Barat Daya pada September 2025 mencapai 17,50%, menurun sebesar 0,45% dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 17,95% (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, persoalan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan perhatian, terutama dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh sumber penghidupan yang produktif (Ummah, 2024). Kondisi tersebut juga relevan dengan perkembangan Kota Sorong sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di Papua Barat Daya, yang menunjukkan adanya perkembangan ekonomi daerah di tengah persoalan kemiskinan masyarakat (Badan Pusat Statistik Kota Sorong, 2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Sorong, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 15,35% pada tahun 2021 menjadi 13,67% pada tahun 2024 dan 13,55% pada tahun 2025, tetapi penurunan pada tahun 2025 hanya mencapai 0,12 poin persentase, sementara jumlah penduduk miskin justru meningkat dari 40,68 ribu jiwa menjadi 41,39 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Sorong, 2025). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Sorong yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan peningkatan dari 2,64% pada tahun 2024 menjadi 3,81% pada tahun 2025 (Badan Pusat Statistik Kota Sorong, 2026). Perbedaan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah belum dengan sendirinya mencerminkan

pemerataan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi (Dewi & Suryadi, 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan yang bersifat sementara, tetapi perlu diarahkan pada penguatan kemampuan masyarakat untuk membangun sumber penghidupan secara mandiri (Leuhery et al., 2023). Pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu pendekatan yang relevan karena memungkinkan individu maupun kelompok rentan memperoleh akses terhadap sumber daya produktif, meningkatkan kapasitas usaha, serta mengembangkan potensi yang dimiliki untuk memperbaiki kondisi ekonominya (Oagai et al., 2024). Hal ini sejalan dengan pemikiran Sitaniapessy dan Nganji (2025) yang menempatkan pengembangan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal sebagai salah satu cara gereja dalam meningkatkan kesejahteraan jemaat. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan ekonomi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena keterbatasan yang dialami masyarakat tidak selalu dapat diatasi melalui kemampuan individu semata (Ummah, 2024). Oleh karena itu, lembaga sosial dan keagamaan, termasuk gereja, memiliki ruang keterlibatan dalam mendukung pengembangan kapasitas serta kemandirian ekonomi masyarakat di lingkungan pelayanannya (Nyortetma et al., 2024).

Secara konseptual, pemberdayaan menurut Suharto (2014) merupakan proses penguatan keberdayaan individu atau kelompok yang mengalami keterbatasan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber-sumber produktif, meningkatkan pendapatan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya (Suharto, 2014). Pemahaman tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan materi, tetapi juga pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya dan menentukan arah kehidupannya secara lebih mandiri (Oagai et al., 2024). Sejalan dengan pemikiran tersebut, Leuhery et al. (2023) menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan melalui perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pelatihan, dan peluang usaha. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi perlu dipahami sebagai suatu proses yang menghubungkan ketersediaan sumber daya, kemampuan individu, dan dukungan lingkungan usaha dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sitaniapessy & Nganji, 2025).

Dalam konteks kehidupan bergereja, keterlibatan terhadap persoalan ekonomi jemaat merupakan bagian dari tanggung jawab gereja dalam menghadirkan pelayanan yang menyentuh kehidupan manusia secara utuh (Simorangkir & Siagian, 2025). Gereja tidak hanya menjalankan pelayanan yang berorientasi pada pembinaan iman dan kehidupan spiritual, tetapi juga dipanggil untuk merespons berbagai persoalan sosial yang memengaruhi kehidupan umat, termasuk kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi (Sihite et al., 2026). Pandangan tersebut sejalan dengan Suwul (2024) yang menjelaskan bahwa panggilan gereja diwujudkan melalui tiga tugas utama, yaitu bersekutu (koinonia), bersaksi (marturia), dan melayani (diakonia), yang menjadi bagian penting dalam kehidupan dan pelaksanaan pelayanan gereja. Dalam kaitannya dengan persoalan ekonomi, diakonia memiliki relevansi karena pelayanan gereja tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan konkret jemaat dan membangun kehidupan yang saling menopang (Pandu, 2024).

Pemahaman diakonia tersebut terus berkembang sehingga tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga sebagai pelayanan yang mendorong pemulihan martabat, penguatan kapasitas, dan kemandirian komunitas (Setiawan & Harita, 2022). Salah satu pendekatan yang berkaitan dengan orientasi tersebut adalah diakonia transformatif, yaitu pelayanan yang mengupayakan perubahan kondisi

ketidakberdayaan melalui kepedulian, transformasi, pemberdayaan, advokasi, dan pembangunan kehidupan bersama yang inklusif (Siregar & Siagian, 2025). Hal ini sejalan dengan pemikiran Simamora et al. (2022)yang menempatkan diakonia transformatif sebagai pelayanan yang diarahkan pada pembebasan masyarakat dari berbagai bentuk keterbatasan dan ketidakadilan.

Pendekatan ini menempatkan kelompok rentan bukan semata-mata sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kehidupannya melalui kesempatan dan dukungan yang tersedia (Siregar & Siagian, 2025). Meskipun demikian, pelayanan karitatif tetap memiliki arti penting dalam menjawab kebutuhan mendesak jemaat, sedangkan pendekatan pemberdayaan memberikan ruang bagi penguatan kemampuan dan kemandirian dalam jangka panjang (Pandu, 2024). Dengan demikian, keterlibatan gereja dalam pemberdayaan ekonomi jemaat dapat dipahami sebagai pengembangan pelayanan diakonia yang memperhatikan kebutuhan langsung sekaligus membuka kesempatan bagi jemaat untuk membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik (Setiawan & Harita, 2022).

Keterlibatan gereja dalam pemberdayaan ekonomi jemaat telah diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing komunitas (Yurianta et al., 2025). Penelitian Sitaniapessy dan Nganji (2025) pada GKS Jemaat Pamalar menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi jemaat dapat dilakukan melalui pemanfaatan potensi pertanian sebagai kegiatan produktif yang mendukung kesejahteraan anggota jemaat. Berbeda dalam bentuk kegiatannya, penelitian Yurianta et al. (2025) mengenai peran gereja dalam membangun ekonomi anggota jemaat Gereja-Gereja Kristen Protestan di Bali memperlihatkan keterlibatan gereja melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal, pembentukan koperasi, dan penyediaan jaringan usaha. Sementara itu, penelitian Nyortetma et al. (2024) menempatkan pemberdayaan ekonomi jemaat sebagai bagian dari tindakan pastoral gereja yang membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pelayanan dalam mengembangkan potensi masyarakat jemaat. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa gereja memiliki peluang untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi melalui penguatan kapasitas individu, pemanfaatan potensi lokal, serta dukungan kelembagaan dalam kehidupan jemaat.

Selain melalui kegiatan ekonomi produktif, pengembangan ekonomi jemaat juga berkaitan dengan bagaimana gereja mengelola sumber daya dan fasilitas yang dimiliki untuk menunjang kegiatan usaha (Silitonga, 2023). Penelitian Frebin Thea Rona dan Lestari (2025) mengenai revitalisasi aset Retreat Centre GBKP Suka Makmur menunjukkan bahwa pemanfaatan aset gereja sebagai instrumen pengembangan ekonomi masih menghadapi kendala, khususnya keterbatasan pengelolaan profesional dan promosi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki gereja belum tentu memberikan manfaat ekonomi secara optimal apabila tidak disertai pengelolaan yang terarah (Frebin Thea Rona & Lestari, 2025).

Berbeda dengan kajian yang lebih menekankan pemanfaatan aset gereja, penelitian Fergie dan Irwanto (2026) memberikan perhatian pada pengelolaan program pelayanan gereja melalui aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kedua fokus penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan kegiatan ekonomi dalam organisasi gereja membutuhkan perhatian terhadap pemanfaatan sumber daya sekaligus proses pengelolaan program yang mendukung pelaksanaannya. Di sisi lain, pengelolaan program dalam organisasi pelayanan juga membutuhkan pembagian tanggung jawab, koordinasi, dan pengawasan yang memadai agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Nisa et al., 2022).

Dalam konteks kondisi ekonomi di Kota Sorong yang telah diuraikan sebelumnya, GKI Ekklesia Klasaman mengembangkan program pemberdayaan ekonomi jemaat melalui Pasar

Obor sebagai salah satu bentuk keterlibatan gereja dalam menjawab persoalan kesejahteraan jemaat (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ GKI Ekklesia Klasaman, 10 Februari 2026). Menurut Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ), pembentukan program ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya beban pengeluaran pelayanan diakonia yang sebelumnya lebih banyak bertumpu pada pemberian bantuan sembako kepada jemaat rentan, seperti janda, duda, yatim, piatu, dan yatim-piatu (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ GKI Ekklesia Klasaman, 10 Februari 2026).

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua PHMJ bersama Majelis Urusan Pelayanan Kasih dan Keadilan (PKK) serta Urusan Aset Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) mengembangkan pendekatan pemberdayaan ekonomi yang melengkapi pelayanan diakonia karitatif sebelumnya (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ GKI Ekklesia Klasaman, 10 Februari 2026). Sasaran awal program ini adalah jemaat penerima bantuan diakonia yang masih berada pada usia produktif dengan pertimbangan bahwa kelompok tersebut masih memiliki kemampuan untuk mengembangkan kegiatan usaha dan membangun sumber pendapatan sendiri (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ GKI Ekklesia Klasaman, 10 Februari 2026).

Gagasan pemberdayaan tersebut kemudian diwujudkan melalui penyediaan fasilitas usaha yang dikenal sebagai Pasar Obor atau Lapak Ekklesia, yaitu tempat berjualan yang disediakan oleh PHMJ di seberang gedung utama gereja (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ GKI Ekklesia Klasaman, 10 Februari 2026). Pasar Obor menyediakan sekitar 20 lapak yang dapat dimanfaatkan jemaat untuk menjual berbagai produk makanan siap saji, seperti lauk-pauk, sayuran, makanan olahan, dan aneka kue, serta didukung dengan pemberian modal usaha bagi penerima diakonia yang menjadi sasaran awal program (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ GKI Ekklesia Klasaman, 10 Februari 2026).

Program ini mulai dijalankan pada 22 Maret 2025 dan dirancang sebagai ruang usaha yang mempertemukan potensi ekonomi jemaat dengan kebutuhan konsumen di sekitar lingkungan gereja (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ GKI Ekklesia Klasaman, 10 Februari 2026). Dalam perkembangannya, ketersediaan lapak yang belum seluruhnya dimanfaatkan mendorong PHMJ untuk membuka kesempatan berjualan kepada jemaat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dan jemaat secara umum, meskipun penerima diakonia usia produktif tetap menjadi prioritas awal program (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ GKI Ekklesia Klasaman, 10 Februari 2026). Keberadaan Pasar Obor menunjukkan adanya kesempatan bagi jemaat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui fasilitas dan dukungan yang disediakan gereja (Oagai et al., 2024). Dalam wawancara prapenelitian, Ketua PHMJ menyampaikan adanya indikasi perubahan positif yang terlihat dari sebagian jemaat penerima diakonia yang sebelumnya belum mampu memberikan persembahan, tetapi kemudian mulai dapat memberikan persembahan dari hasil kegiatan usahanya (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ GKI Ekklesia Klasaman, 10 Februari 2026).

Perubahan ekonomi juga tergambar melalui pengalaman salah seorang pedagang penerima diakonia yang menyampaikan bahwa hasil berjualan di Pasar Obor telah membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan sepeda motor, serta membiayai keikutsertaan dalam perjalanan wisata rohani jemaat (Wawancara dengan Ibu Angelina Burdham, selaku pedagang diakonia, 26 Mei 2026). Pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa kegiatan usaha di Pasar Obor dapat membuka kesempatan bagi sebagian jemaat untuk memperoleh pendapatan dan meningkatkan kontribusi ekonomi dalam kehidupan keluarga (Suharto, 2014). Akan tetapi, pengalaman individual tersebut belum dapat digunakan

untuk menyimpulkan bahwa seluruh peserta telah mengalami perubahan ekonomi yang sama (Sarpin et al., 2025).

Di balik adanya indikasi perubahan tersebut, pengelolaan Pasar Obor masih menghadapi sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian (Fergie & Irwanto, 2026). Berdasarkan wawancara prapenelitian, belum tersedia dokumentasi evaluasi yang sistematis mengenai perkembangan kondisi ekonomi jemaat yang terlibat dalam program, sehingga perubahan yang dialami peserta belum seluruhnya terdokumentasi secara terstruktur (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ GKI Ekklesia Klasaman, 10 Februari 2026). Perluasan kesempatan berjualan kepada jemaat umum juga memperlihatkan adanya perkembangan sasaran program yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan tujuan awal pemberdayaan penerima diakonia usia produktif (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ GKI Ekklesia Klasaman, 10 Februari 2026). Selain itu, belum terkonfirmasinya mekanisme pemantauan berkala dan evaluasi perkembangan usaha peserta menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengelolaan program dilaksanakan untuk menjaga kesesuaian antara tujuan awal, pelaksanaan kegiatan, dan perkembangan pemberdayaan ekonomi jemaat.

Persoalan tersebut menjadi penting karena keberadaan fasilitas usaha dan pemberian modal belum dengan sendirinya menggambarkan keseluruhan proses pemberdayaan ekonomi jemaat (Oagai et al., 2024). Pengelolaan program juga perlu memperhatikan bagaimana tujuan ditetapkan, bagaimana sumber daya serta tanggung jawab diatur, bagaimana peserta didorong untuk menjalankan kegiatan usaha, dan bagaimana perkembangan program dipantau secara berkelanjutan (Terry, 1953). Dalam organisasi pelayanan gereja, proses pengelolaan tersebut juga perlu diselaraskan dengan misi pelayanan, karakteristik organisasi nirlaba, serta kebutuhan para pihak yang terlibat (Tobing & Saputra, 2025). Oleh sebab itu, keberadaan Pasar Obor perlu dikaji bukan hanya sebagai fasilitas ekonomi yang disediakan gereja, tetapi sebagai suatu program yang membutuhkan proses pengelolaan untuk mendukung tujuan pemberdayaan ekonomi jemaat (Fergie & Irwanto, 2026).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan, kajian pemberdayaan ekonomi jemaat telah memberikan perhatian terhadap berbagai bentuk keterlibatan gereja, seperti pengembangan potensi lokal, pemberian modal, pelatihan keterampilan, pemanfaatan aset, dan penguatan kelembagaan usaha (Yurianta et al., 2025). Kajian mengenai pengelolaan aset dan program pelayanan gereja juga memperlihatkan pentingnya kapasitas manajerial, pembagian tanggung jawab, koordinasi, serta evaluasi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan (Fergie & Irwanto, 2026). Namun, dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan, belum tampak kajian yang secara khusus mengintegrasikan pengelolaan program pemberdayaan ekonomi berbasis pasar dalam organisasi gereja dengan analisis fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi jemaat.

Sebagian penelitian lebih menekankan bentuk kegiatan pemberdayaan atau pemanfaatan potensi ekonomi jemaat, sedangkan kajian lainnya memberikan perhatian terhadap pengelolaan program pelayanan secara terpisah. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian untuk memahami bagaimana pengelolaan program pemberdayaan ekonomi jemaat berbasis pasar dilaksanakan dalam organisasi gereja, terutama ketika program tersebut melibatkan penyediaan fasilitas usaha, pemberian modal, keterlibatan peserta dengan latar belakang berbeda, serta kebutuhan pendampingan dan pemantauan terhadap perkembangan kegiatan ekonomi jemaat.

Untuk memahami persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan teori manajemen George R. Terry sebagai landasan utama dalam menganalisis pengelolaan Pasar Obor. Terry

(Terry, 1953) menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses yang terdiri atas perencanaan *(planning)*, pengorganisasian *(organizing)*, penggerakan *(actuating)*, dan pengendalian *(controlling)* untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Terry, 1953). Perencanaan berkaitan dengan penetapan tujuan dan penentuan tindakan yang diperlukan, sedangkan pengorganisasian berhubungan dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengaturan sumber daya dalam pelaksanaan program (R.Terry & Rue, 2019; Terry, 1953). Penggerakan berkaitan dengan pengarahan, motivasi, dan dorongan kepada pihak-pihak yang terlibat agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai tujuan, sedangkan pengendalian mencakup pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan (Erlangga et al., 2023; R.Terry & Rue, 2019; Terry, 1953). Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu proses pengelolaan yang memungkinkan organisasi menjalankan kegiatan secara terarah sekaligus melakukan perbaikan berdasarkan hasil pemantauan (Nisa et al., 2022).

Penerapan teori tersebut dalam organisasi gereja perlu mempertimbangkan karakteristik gereja sebagai organisasi nirlaba yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan operasional, tetapi juga memiliki misi pelayanan kepada jemaat (Tobing & Saputra, 2025). Pandangan tersebut sejalan dengan Fergie dan Irwanto (2026) yang menekankan bahwa pengelolaan program pelayanan gereja memerlukan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan demikian, pengelolaan Pasar Obor perlu dipahami melalui keterkaitan antara tujuan pemberdayaan ekonomi, pembagian tanggung jawab antarpelaksana, keterlibatan jemaat, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang sesuai dengan karakteristik pelayanan gereja. Kerangka POAC digunakan untuk menganalisis proses pengelolaan tersebut, bukan untuk mengukur efektivitas program secara kuantitatif.

Selain teori pengelolaan, penelitian ini menggunakan konsep pemberdayaan ekonomi yang dikemukakan oleh Suharto (2014) untuk memahami bagaimana pengelolaan Pasar Obor berkaitan dengan peningkatan keberdayaan jemaat. Suharto (2014) memandang pemberdayaan sebagai proses sekaligus tujuan, yaitu proses penguatan kemampuan kelompok rentan dan tujuan berupa meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan, memperoleh mata pencaharian, menjangkau sumber daya produktif, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial (Suharto, 2014). Pemberdayaan juga dapat dipahami melalui empat dimensi kekuasaan, yaitu *power within, power to, power over, dan power with*, yang masing-masing berkaitan dengan keyakinan terhadap kemampuan diri, kemampuan bertindak, kemampuan mengendalikan sumber daya dan keputusan, serta kemampuan membangun solidaritas melalui tindakan bersama (Suharto, 2014). Dalam konteks Pasar Obor, konsep tersebut membantu memahami apakah penyediaan tempat berjualan, dukungan modal, pengarahan, dan hubungan antarpedagang memberikan kesempatan bagi jemaat untuk mengembangkan kemampuan ekonomi dan mengelola sumber daya secara lebih mandiri (Oagai et al., 2024). Pemahaman ini juga dilengkapi oleh pandangan Oagai et al. (2024) bahwa pemberdayaan ekonomi membutuhkan akses terhadap sumber daya, teknologi, pasar, dan permintaan agar kegiatan produktif dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Sementara itu, diakonia transformatif ditempatkan sebagai konteks pelayanan yang melatarbelakangi pembentukan Pasar Obor, bukan sebagai objek teori utama yang dianalisis secara terpisah. Penempatan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa pelayanan diakonia dapat mengintegrasikan kepedulian terhadap kebutuhan jemaat dengan pemberdayaan yang mendorong kelompok rentan menjadi subjek aktif dalam mengembangkan kehidupannya (Siregar & Siagian, 2025). Dengan demikian, perhatian utama penelitian tetap diarahkan pada bagaimana fungsi-fungsi pengelolaan dilaksanakan, faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta bagaimana pengelolaan tersebut berkaitan dengan

perubahan keberdayaan ekonomi jemaat. Dampak pengelolaan Pasar Obor dalam penelitian ini juga diperhatikan melalui perubahan pada dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual sebagaimana ditemukan dalam kehidupan peserta dan lingkungan pelayanan GKI Ekklesia Klasaman. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Pasar Obor dalam pemberdayaan ekonomi jemaat, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaannya, serta menganalisis dampak pengelolaan Pasar Obor terhadap pemberdayaan ekonomi jemaat di GKI Ekklesia Klasaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengelolaan Pasar Obor dalam pemberdayaan ekonomi jemaat di GKI Ekklesia Klasaman, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses pengelolaan, pengalaman para pelaku, kondisi yang memengaruhi pelaksanaan program, serta perubahan yang dirasakan peserta, bukan pada pengukuran hubungan antarvariabel secara statistik.

Informan dipilih secara purposif sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mengenai Pasar Obor. Informan meliputi Ketua PHMJ, majelis yang berkaitan dengan Pelayanan Kasih dan Keadilan (PKK) serta Urusan Ekubang, ketua lapak, pedagang penerima diakonia, dan pedagang dari kalangan jemaat umum. Wawancara dilakukan pada periode Mei hingga September 2026. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan laporan gereja, termasuk dokumen Sidang Jemaat GKI Ekklesia Klasaman. Penggunaan sumber yang beragam dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang tidak hanya bertumpu pada keterangan satu pihak.

Analisis data dilakukan melalui proses pemilihan dan penyederhanaan informasi, pengelompokan berdasarkan tema penelitian, interpretasi temuan, serta penyajian hasil secara deskriptif. Data mengenai praktik pengelolaan dikelompokkan berdasarkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Data mengenai faktor pendukung dan penghambat dianalisis berdasarkan keterkaitannya dengan kapasitas pengelola, fasilitas, sumber daya, keterampilan usaha, pasar, dan keberlanjutan kelembagaan. Sementara itu, perubahan yang dirasakan peserta ditelaah melalui dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan pimpinan gereja, majelis, dan pedagang, serta memeriksa kesesuaiannya dengan hasil observasi dan dokumentasi yang tersedia. Analisis dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara data empiris dan kerangka teori pengelolaan Terry (1953) serta pemberdayaan ekonomi Suharto (Suharto, 2014) dan Oagai et al. (2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Pasar Obor dalam Pemberdayaan Ekonomi Jemaat

Pengelolaan Pasar Obor memperlihatkan bahwa program pemberdayaan ekonomi jemaat dapat berkembang dari inisiatif pelayanan gereja yang berangkat dari pengamatan terhadap kebutuhan dan potensi lokal. Namun, tersedianya fasilitas berjualan dan dukungan modal belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa program telah dikelola secara terstruktur untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Pengelolaan perlu dilihat dari bagaimana gereja merumuskan tujuan, mengatur sumber daya dan pihak yang terlibat, menggerakkan peserta, serta mengawasi pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan Terry (1953) yang memandang manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya organisasi. Dalam konteks gereja, proses tersebut juga perlu mempertimbangkan karakteristik lembaga nirlaba yang tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan kegiatan, tetapi juga pada misi pelayanan dan kepentingan pihak-pihak yang dilayani (Horvat, 2020; Tobing & Saputra, 2025). Oleh karena itu,

pengelolaan Pasar Obor dianalisis dengan memperhatikan keterkaitan antara pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dan tujuan pemberdayaan ekonomi jemaat.

Perencanaan Pasar Obor berawal dari inisiatif Ketua PHMJ, Pdt. Yohanis Sattu, setelah melakukan kunjungan dari rumah ke rumah dan mengamati kondisi sosial ekonomi jemaat. Pengamatan tersebut memperlihatkan adanya potensi hasil kebun pada jemaat Rayon 1-6, sementara jemaat pada rayon lainnya banyak bekerja sebagai pegawai yang membutuhkan makanan siap santap setelah menyelesaikan pekerjaan. Pada saat yang sama, pedagang hasil kebun menghadapi kendala jarak dan biaya transportasi menuju Pasar Remu. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi gagasan untuk menyediakan tempat berjualan di lingkungan gereja, sehingga potensi produksi jemaat dapat dipertemukan dengan kebutuhan konsumen di sekitarnya (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ, 29 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Angelina Burdham, selaku pedagang diakonia, 26 Mei 2026).

Dasar perencanaan tersebut menunjukkan bahwa pengelola telah berupaya mengenali persoalan berdasarkan keadaan yang dijumpai di lingkungan jemaat, bukan semata-mata berdasarkan gagasan untuk membangun unit usaha gereja. Hal ini sesuai dengan pandangan Terry (1953) bahwa perencanaan perlu bertolak dari fakta dan informasi yang menjadi dasar penentuan tujuan serta tindakan yang akan dilakukan. Pemilihan lokasi di seberang gedung gereja juga memperlihatkan pertimbangan untuk mendekatkan tempat pemasaran kepada pedagang sekaligus memanfaatkan potensi konsumen yang melintas di jalan utama. Dengan demikian, kekuatan perencanaan Pasar Obor terletak pada kemampuan pengelola menghubungkan kebutuhan ekonomi jemaat, potensi sumber daya lokal, dan peluang pasar. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Oagai et al. (2024), yang menempatkan akses terhadap sumber daya produktif, infrastruktur, pasar, dan permintaan konsumen sebagai unsur yang saling berkaitan dalam pengembangan kegiatan ekonomi.

Perencanaan Pasar Obor juga memiliki dasar pelayanan yang berkaitan dengan perubahan orientasi diakonia. Ketua PHMJ memandang bahwa jemaat yang masih berada pada usia produktif dan memiliki kemampuan bekerja perlu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan sumber penghasilan sendiri, sedangkan bantuan karitatif tetap diperlukan bagi jemaat lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan fisik. Pandangan tersebut kemudian menjadi dasar untuk membedakan pelayanan diakonia perhatian dan diakonia pemberdayaan (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ, 29 Mei 2026; Hasil Sidang Jemaat ke-XXVIII, 23 November 2024). Dalam perspektif Suharto (2014), orientasi tersebut menunjukkan pemahaman bahwa pemberdayaan tidak cukup diwujudkan melalui pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga perlu membuka akses terhadap sumber-sumber produktif agar kelompok rentan dapat meningkatkan pendapatan dan menentukan kehidupan secara lebih mandiri. Oleh karena itu, gagasan Pasar Obor memiliki kesesuaian dengan tujuan pemberdayaan karena penerima diakonia tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang memperoleh bantuan, tetapi juga diberi kesempatan untuk menjalankan kegiatan ekonomi.

Meskipun demikian, ketepatan dalam mengenali kebutuhan dan merumuskan tujuan umum belum sepenuhnya diikuti oleh perencanaan operasional yang terukur. Program telah memiliki arah untuk membuka kesempatan usaha dan meningkatkan pendapatan, tetapi belum disertai sasaran yang konsisten mengenai jumlah pedagang aktif, perkembangan kemampuan usaha, kebutuhan pendampingan, dan indikator perubahan ekonomi peserta. Perbedaan antara sekitar 60 penerima diakonia yang dipandang masih produktif, sekitar 17 orang yang menyatakan bersedia mengikuti program pada tahap awal, dan sekitar 10 pedagang yang rutin berjualan memperlihatkan bahwa jumlah kelompok sasaran, minat awal untuk berpartisipasi, dan keberlanjutan keterlibatan merupakan kondisi yang berbeda (Wawancara dengan Ibu Hamni Bolota, selaku Majelis Urusan PKK, 27 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Ester Elkaratan, selaku Majelis Urusan PKK, 27 Mei 2026; Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ, 29 Mei 2026). Perbedaan tersebut semestinya menjadi pertimbangan

dalam perencanaan, sebab penyediaan fasilitas tidak otomatis menjamin bahwa seluruh kelompok sasaran bersedia dan mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan.

Dalam hal ini, kelemahan perencanaan bukan terutama terletak pada tidak adanya tujuan, melainkan pada belum diterjemahkannya tujuan pemberdayaan ke dalam sasaran pelaksanaan dan ukuran perkembangan yang dapat dipantau. Terry dan Rue (2019) menempatkan perencanaan sebagai proses menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, termasuk mempertimbangkan apa yang dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan kegiatan dilakukan. Nisa et al. (2022) juga menjelaskan bahwa perencanaan program pelayanan perlu mencakup tujuan, kebijakan, prosedur, anggaran, dan standar kerja sebagai pedoman pelaksanaan. Jika dikaitkan dengan Pasar Obor, perencanaan belum cukup menjawab bagaimana mempertahankan keterlibatan peserta, bagaimana mengembangkan kemampuan usaha, serta bagaimana mengukur perubahan ekonomi yang menjadi tujuan program. Padahal, menurut Suharto (2014), pemberdayaan sebagai proses perlu mengarah pada penguatan kemampuan kelompok rentan, bukan hanya pembukaan kesempatan untuk memperoleh sumber daya. Dengan demikian, perencanaan Pasar Obor telah memiliki dasar kontekstual dan orientasi pelayanan yang kuat, tetapi masih perlu diperkuat dengan sasaran operasional yang menghubungkan penyediaan fasilitas dengan perkembangan keberdayaan peserta.

Pengorganisasian Pasar Obor dilaksanakan melalui pembagian peran antara PHMJ, Urusan Ekubang, dan Urusan PKK. Ekubang terlibat dalam pembangunan fasilitas, sedangkan PKK mendata penerima diakonia yang bersedia berjualan. Pembangunan lapak juga memperoleh dukungan dari warga 14 rayon melalui sumbangan dana, material, dan tenaga. Dukungan tersebut memungkinkan pembangunan sekitar 20 lapak beserta sejumlah fasilitas pendukung dengan pagu pembangunan sebesar Rp5.000.000. Satu lapak diperkirakan dapat digunakan oleh dua hingga tiga pedagang sehingga kapasitas keseluruhan mencapai sekitar 40-60 pedagang (Wawancara dengan Ibu Anigreth Malibela, selaku Ketua Lapak dan Sekretaris Urusan Ekubang, 26 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Hamni Bolota dan Ibu Anna Maulete, 27 Mei 2026; Wawancara telepon dengan Bapak Bremmer, 1 Oktober 2026). Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa gereja telah menghubungkan unsur kelembagaan dengan dukungan jemaat dalam penyediaan sumber daya fisik bagi pelaksanaan program.

Kemampuan menggerakkan 14 rayon untuk menyediakan dana, material, dan tenaga memperlihatkan bahwa pengorganisasian Pasar Obor tidak hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki oleh pimpinan gereja, tetapi juga memanfaatkan potensi kolektif jemaat. Dalam konsep pemberdayaan Suharto (2014), keadaan ini berkaitan dengan dimensi *power with*, yaitu kekuatan yang dibangun melalui kerja sama dan tindakan kolektif untuk mencapai kepentingan bersama. Namun, partisipasi dalam penyediaan fasilitas perlu dibedakan dari partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Jemaat telah terlibat dalam pembangunan lapak melalui sumbangan dan tenaga, tetapi keterlibatan calon pedagang pada tahap awal lebih banyak berupa penerimaan informasi dan pernyataan kesediaan mengikuti program. Perumusan awal, penentuan lokasi, dan rancangan pelaksanaan terutama dibicarakan oleh pimpinan gereja bersama unsur pelaksana terkait (Wawancara dengan Ibu Hohame dan Ibu Dongeubun, selaku pedagang diakonia, 21 September 2026). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengorganisasian telah berhasil membangun partisipasi dalam penyediaan sumber daya, tetapi belum sepenuhnya memperluas keterlibatan peserta sebagai pihak yang turut menentukan kebutuhan dan arah pengelolaan program. Padahal, penguatan keberdayaan juga berkaitan dengan kesempatan kelompok sasaran untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dalam keputusan yang menyangkut kehidupannya (Suharto, 2014).

Persoalan pengorganisasian berikutnya terlihat ketika jumlah penerima diakonia yang bersedia berjualan tidak memenuhi kapasitas lapak yang tersedia. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas, kesempatan berjualan kemudian dibuka bagi jemaat umum dari berbagai rayon. Keputusan tersebut memungkinkan lapak digunakan secara lebih luas dan menghindari

fasilitas yang tidak termanfaatkan. Akan tetapi, keputusan tersebut juga mengubah cakupan program yang semula terutama diarahkan kepada penerima diakonia produktif menjadi ruang usaha yang terbuka bagi kelompok jemaat yang lebih luas (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ, 29 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Ester Elkaratan, selaku Majelis Urusan PKK, 27 Mei 2026). Perluasan kepesertaan ini tidak serta-merta bertentangan dengan tujuan pemberdayaan, tetapi perlu diikuti penataan prioritas yang jelas. Apabila keterbukaan hanya didasarkan pada pertimbangan mengisi lapak yang kosong, perhatian terhadap kelompok rentan sebagai sasaran awal dapat berkurang. Karena itu, pengorganisasian perlu menyeimbangkan pemanfaatan fasilitas dengan prinsip keberpihakan kepada kelompok yang sejak awal menjadi tujuan pelayanan. Dalam perspektif Suharto (2014), pemberdayaan tidak hanya menyangkut akses terhadap sumber daya, tetapi juga kesempatan kelompok rentan untuk memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut.

Dalam pelaksanaan harian, Ibu Anigreth Malibela berperan sebagai ketua lapak yang menangani persoalan operasional dan berkoordinasi dengan PHMJ. Komunikasi berlangsung melalui percakapan langsung, telepon, dan grup *WhatsApp*, sedangkan persoalan yang memerlukan keputusan lebih lanjut dapat dibahas dalam forum gereja. Ketua lapak juga membantu menyelesaikan perselisihan antarpedagang agar kegiatan berjualan tetap berlangsung dalam suasana kekeluargaan (Wawancara dengan Ibu Anigreth Malibela, selaku Ketua Lapak, 26 Mei 2026; Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ, 29 Mei 2026). Pengaturan tersebut menunjukkan adanya koordinasi antara unsur pengelola dan pelaksana lapangan. Namun, mekanisme kerja yang masih banyak berlangsung melalui komunikasi informal membuat batas tanggung jawab, kewenangan mengambil keputusan, dan prosedur penyelesaian persoalan belum seluruhnya terdokumentasi secara tertulis. Rencana pembentukan struktur pengelola yang lebih mandiri juga belum sepenuhnya ditindaklanjuti menjadi sistem kerja yang baku.

Kondisi tersebut penting diperhatikan karena keberlangsungan pengelolaan tidak seharusnya hanya bergantung pada kemampuan dan kehadiran individu tertentu. Terry (1953) menekankan bahwa pengorganisasian mencakup pembentukan hubungan kerja yang efektif, pembagian kegiatan, penempatan orang sesuai tugas, serta penetapan hubungan kewenangan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks organisasi pelayanan, Nisa et al. (2022) menekankan pentingnya kejelasan peran, prosedur, dan akuntabilitas, sedangkan Horvat (2020) menjelaskan bahwa organisasi nirlaba umumnya memiliki struktur yang tidak selalu hierarkis dan dapat melibatkan anggota dengan motivasi pelayanan. Karakteristik tersebut tidak berarti pengelolaan dapat dijalankan tanpa kejelasan tanggung jawab. Sebaliknya, asas kekeluargaan perlu ditopang oleh pengaturan kerja yang dapat dipahami bersama. Oleh sebab itu, pengorganisasian Pasar Obor telah memperlihatkan kekuatan dalam mobilisasi sumber daya dan koordinasi lapangan, tetapi masih memerlukan struktur yang lebih jelas agar tanggung jawab pengelolaan dapat dilanjutkan ketika terjadi pergantian pengurus maupun pimpinan gereja.

Fungsi penggerakan terutama terlihat melalui keterlibatan langsung Ketua PHMJ dalam memantau keadaan lapak, memberi arahan, dan mendorong pedagang untuk tetap menjalankan usaha. Kunjungan ke lokasi dilaporkan berlangsung sekitar empat sampai lima kali dalam sebulan, bahkan dapat mencapai sepuluh kali apabila kunjungan singkat turut diperhitungkan. Kehadiran pimpinan tersebut dipandang sebagai bentuk perhatian terhadap pedagang, termasuk oleh Ibu Angelina Burdham yang merasakan adanya tambahan semangat untuk berjualan. Pendampingan juga menyentuh pengelolaan usaha, antara lain melalui arahan mengenai pembukuan sederhana, pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ, 29 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Anigreth Malibela, selaku Ketua Lapak, 26 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Angelina Burdham, selaku pedagang diakonia, 26 Mei 2026). Kehadiran pimpinan secara langsung memperlihatkan bahwa penggerakan tidak hanya

dilakukan melalui instruksi, tetapi juga melalui perhatian dan dorongan yang membangun keterlibatan peserta.

Selain arahan langsung, penggerakan dilakukan melalui penerapan aturan operasional, seperti kewajiban menjaga kebersihan, larangan menjual kembali sisa dagangan hari sebelumnya, larangan mengonsumsi pinang di area lapak, dan larangan berjualan ketika ibadah berlangsung. Pelanggaran ditangani melalui teguran langsung, dengan kemungkinan tindakan lebih lanjut apabila tidak terdapat perubahan. Upaya promosi juga dilakukan melalui media gereja dan media sosial untuk memperkenalkan keberadaan Pasar Obor kepada jemaat dan masyarakat yang lebih luas (Wawancara dengan Ibu Anigreth Malibela, selaku Ketua Lapak, 26 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Latunussa dan Ibu Hohame, selaku pedagang, 21 September 2026; Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ, 29 Mei 2026). Praktik tersebut menunjukkan bahwa fungsi penggerakan mencakup pengarahan perilaku, pemeliharaan keteraturan, pemberian motivasi, dan upaya memperluas pemasaran. Dalam pandangan Terry (1953), penggerakan merupakan usaha mendorong anggota organisasi agar bersedia bekerja sama dan melaksanakan kegiatan sesuai tujuan serta pengaturan yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, penggerakan Pasar Obor masih lebih menonjol dalam bentuk kehadiran pimpinan, pengarahan informal, penegakan aturan, dan promosi dibandingkan dengan pendampingan usaha yang terencana. Sejumlah pedagang belum memperoleh pelatihan khusus mengenai pembukuan, pengelolaan modal, keterampilan produksi, penentuan harga, dan perhitungan keuntungan. Pendampingan yang tersedia belum berlangsung secara terjadwal dan belum didasarkan pada pemetaan kebutuhan setiap jenis usaha (Wawancara dengan Ibu Hamni Bolota, selaku Majelis Urusan PKK, 27 Mei 2026; Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ, 29 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Hohame, selaku pedagang diakonia, 21 September 2026). Keterbatasan tersebut perlu dilihat secara kritis karena kebutuhan pedagang tidak seluruhnya sama. Pedagang makanan siap santap, misalnya, perlu memahami perhitungan biaya bahan, jumlah produksi, dan risiko dagangan tidak habis, sedangkan pedagang hasil kebun perlu mempertimbangkan ketersediaan hasil panen, waktu penjualan, dan harga komoditas. Apabila pendampingan diberikan secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kebutuhan usaha, pengetahuan yang disampaikan belum tentu dapat diterapkan secara tepat oleh setiap pedagang.

Dalam perspektif Oagai et al. (2024), pengembangan kegiatan ekonomi tidak cukup hanya dengan menyediakan sumber daya, tetapi juga memerlukan keterampilan, kemampuan mengelola usaha, akses pasar, dan dukungan yang membantu peserta memanfaatkan kesempatan produktif. Pandangan ini memperlihatkan bahwa penggerakan Pasar Obor perlu bergerak dari sekadar mendorong kemauan berjualan menuju penguatan kemampuan menjalankan usaha. Suharto (2014) juga menempatkan pemberdayaan sebagai proses penguatan kapasitas agar kelompok rentan mampu memanfaatkan sumber daya dan mengembangkan kehidupannya secara lebih mandiri. Dengan demikian, kehadiran Ketua PHMJ merupakan kekuatan penting dalam penggerakan, tetapi belum dapat menggantikan kebutuhan akan sistem pendampingan yang lebih terarah. Penggerakan yang terlalu bertumpu pada figur pimpinan berisiko melemah ketika terjadi pergantian kepemimpinan, sedangkan pendampingan yang terjadwal, pembagian peran pengelola, dan keterlibatan pedagang dapat membantu menjadikan proses pemberdayaan sebagai tanggung jawab kelembagaan.

Pengawasan Pasar Obor dilakukan melalui pemantauan langsung, laporan foto dari ketua lapak, komunikasi dalam grup, pencatatan kontribusi harian, nota pengeluaran, dan pembahasan dalam forum gereja. Evaluasi disebut berlangsung sekurang-kurangnya setiap tiga bulan. Kontribusi pedagang dibedakan menurut jenis dagangan, yaitu Rp 5.000 per hari bagi pedagang bahan mentah dan Rp 10.000 per hari bagi pedagang makanan siap saji. Penerimaan dan pengeluaran operasional dicatat serta dilaporkan melalui mekanisme yang tersedia, dan pertanggungjawaban keuangan pernah disampaikan dalam sidang jemaat (Wawancara dengan

Ibu Anigreth Malibela, selaku Ketua Lapak, 26 Mei 2026; Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ, 29 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Jamamono, Ibu Hohame, dan Ibu Korokay, selaku pedagang, 21 September 2026). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kegiatan operasional dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan. Keberadaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran juga membantu pengelola mengetahui penggunaan dana untuk kebutuhan operasional pasar.

Namun, pengawasan operasional dan keuangan perlu dibedakan dari evaluasi terhadap hasil pemberdayaan ekonomi. Pencatatan kontribusi dan pengeluaran dapat menjelaskan keadaan keuangan operasional pasar, tetapi tidak secara langsung menunjukkan perubahan pendapatan bersih pedagang, kecukupan modal, perkembangan usaha, atau kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketua PHMJ mengakui bahwa prioritas pada tahun pertama adalah mendorong jemaat agar bersedia berjualan, sehingga ukuran perkembangan ekonomi peserta belum dirumuskan secara khusus (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ, 29 Mei 2026). Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan telah diarahkan untuk menjaga kegiatan pasar tetap berjalan, tetapi belum sepenuhnya digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan pemberdayaan tercapai. Padahal, pengawasan dalam kerangka Terry (1953) tidak hanya berhubungan dengan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan atau standar yang telah ditetapkan serta menyediakan dasar bagi tindakan perbaikan.

Persoalan lain terlihat pada pengelolaan modal awal sebesar Rp 300.000 yang diberikan kepada penerima diakonia. Keterangan informan mengenai pengembaliannya belum seragam. Sebagian menyampaikan bahwa terdapat modal yang belum dikembalikan, sedangkan informan lain menjelaskan bahwa pengembalian dilakukan secara sukarela atau telah dilakukan oleh beberapa penerima. Belum tersedianya catatan tertulis yang lengkap membuat status dana tersebut sulit ditelusuri secara menyeluruh (Wawancara dengan Ibu Ester Elkaratan dan Ibu Hamni Bolota, selaku Majelis Urusan PKK, 27 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Korokay, selaku pedagang non-diakonia, 21 September 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya didukung mekanisme administrasi yang dapat menjelaskan status, penggunaan, dan keberlanjutan modal. Pengelola perlu membedakan apakah modal awal dimaksudkan sebagai bantuan yang tidak wajib dikembalikan atau sebagai dana bergulir yang memiliki ketentuan pengembalian. Kejelasan ini penting karena kedua bentuk dukungan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban yang berbeda. Dalam konteks organisasi nirlaba, Horvat (2020) menekankan bahwa pengendalian internal dan eksternal diperlukan untuk memastikan sumber daya digunakan secara bertanggung jawab. Oleh sebab itu, ketidakjelasan pencatatan modal bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga dapat memengaruhi kemampuan gereja mempertanggungjawabkan sumber daya yang digunakan dalam pelayanan pemberdayaan.

Keterbatasan pengawasan tersebut juga berkaitan dengan belum adanya umpan balik yang sistematis untuk memperbaiki perencanaan dan penggerakan. Data mengenai jumlah pedagang yang aktif, alasan peserta tidak lagi berjualan, perubahan penjualan, biaya usaha, serta kebutuhan pendampingan seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk menentukan tindak lanjut. Penurunan aktivitas pedagang, misalnya, tidak cukup dipahami sebagai persoalan kedisiplinan karena dapat berkaitan dengan rendahnya jumlah pembeli, dagangan yang tidak habis, cuaca, kelelahan, maupun keterbatasan modal. Tanpa pencatatan dan analisis terhadap penyebab tersebut, keputusan pengelola berisiko hanya mengatasi gejala, bukan persoalan yang mendasari menurunnya keterlibatan peserta. Dalam hal ini, Terry (1953) menekankan bahwa fungsi-fungsi manajemen saling berhubungan dan proses pengelolaan lebih tepat dipahami sebagai suatu siklus. Hasil pengawasan perlu dikembalikan menjadi informasi bagi perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan berikutnya. Evaluasi dalam organisasi nirlaba juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki program, bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (Horvat, 2020).

Berdasarkan keseluruhan fungsi tersebut, pengelolaan Pasar Obor memperlihatkan adanya kekuatan sekaligus keterbatasan yang saling berkaitan. Perencanaan telah berangkat dari identifikasi kebutuhan dan potensi jemaat, tetapi belum sepenuhnya menetapkan sasaran operasional dan ukuran perkembangan peserta. Pengorganisasian berhasil memobilisasi sumber daya gereja dan solidaritas 14 rayon, tetapi struktur pengelola yang mandiri dan keterlibatan peserta dalam pengambilan keputusan masih perlu diperkuat. Penggerakan menunjukkan keterlibatan pimpinan yang intensif dan kemampuan menjaga keteraturan kegiatan, tetapi belum didukung pendampingan usaha yang terencana dan merata. Sementara itu, pengawasan telah berjalan pada aspek operasional dan keuangan, tetapi belum secara konsisten mengukur perubahan ekonomi peserta serta menghubungkan hasil evaluasi dengan perbaikan program. Pola tersebut menunjukkan bahwa kelemahan pada satu fungsi berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi lainnya: ketiadaan sasaran terukur dalam perencanaan menyulitkan pengawasan, struktur yang belum mandiri meningkatkan ketergantungan pada figur, sedangkan pendampingan yang belum terencana membatasi kemampuan peserta memanfaatkan fasilitas dan modal secara optimal (Nisa et al., 2022; Terry, 1953).

Dengan demikian, pengelolaan Pasar Obor dapat dikatakan telah memiliki dasar kelembagaan dan modal sosial yang kuat, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi sistem pengelolaan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi. Jika di analisa penyediaan lapak dan modal awal telah membuka akses terhadap sumber daya produktif, sementara partisipasi 14 rayon menunjukkan adanya kekuatan kolektif dalam mendukung program (Suharto, 2014). Namun, penguatan kemampuan usaha, partisipasi peserta dalam keputusan, dan pengembangan kemandirian pengelolaan masih membutuhkan perhatian lebih lanjut. Oagai et al. (2024) juga menegaskan pentingnya keterhubungan antara sumber daya, kemampuan, akses pasar, dan permintaan agar kegiatan ekonomi dapat berkembang. Dalam konteks gereja sebagai organisasi nirlaba, pengelolaan tersebut perlu memadukan keteraturan organisasi dengan nilai pelayanan dan persekutuan, sebab gereja tidak hanya berfungsi sebagai organisasi yang mengatur kegiatan, tetapi juga sebagai persekutuan yang menjalankan misi pelayanan (Horvat, 2020; Tobing & Saputra, 2025). Oleh karena itu, penguatan pengelolaan Pasar Obor tidak hanya diperlukan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas jual beli, tetapi juga untuk memastikan bahwa sarana, dukungan, dan keterlibatan jemaat benar-benar diarahkan pada pengembangan kemampuan ekonomi peserta secara lebih terencana dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Pasar Obor

Faktor pendukung dan penghambat Pasar Obor perlu dibaca sebagai kondisi yang saling berhubungan. Kepemimpinan, fasilitas, sumber daya lokal, keterampilan, dan jaringan konsumen tidak bekerja secara terpisah. Keberadaan fasilitas, misalnya, dapat membuka akses ekonomi, tetapi manfaatnya dibatasi apabila jumlah pembeli tidak memadai atau pedagang belum memiliki kemampuan untuk mempertahankan usaha. Sebaliknya, dukungan sosial dan potensi lokal dapat menjadi modal penting apabila dihubungkan dengan pengelolaan yang mampu mengembangkan kapasitas peserta.

Faktor pendukung.

Salah satu faktor utama adalah keterlibatan langsung Ketua PHMJ dalam mendampingi pedagang dan menangani persoalan operasional. Kehadiran pimpinan memperkuat komunikasi antara pengelola dan peserta, menyediakan ruang untuk menyampaikan kendala, serta mendorong sebagian pedagang mempertahankan kegiatan usaha. Dalam perspektif Terry (1953), keterlibatan tersebut berkaitan dengan fungsi penggerakan melalui pengarahan dan komunikasi. Dalam konteks pelayanan gereja, kepemimpinan juga memiliki dimensi pastoral karena dukungan diberikan melalui perhatian terhadap keadaan ekonomi jemaat. Namun,

kekuatan ini masih bergantung pada keterlibatan individu dan belum sepenuhnya berkembang menjadi sistem pendampingan yang dapat dilanjutkan oleh struktur pengelola lain.

Faktor pendukung berikutnya adalah tersedianya fasilitas lapak yang berlokasi dekat dengan lingkungan jemaat dan jalan raya utama. Ibu Angelina Burdham menjelaskan bahwa sebelum berjualan di Pasar Obor, biaya taksi pulang pergi untuk membawa dagangan ke pasar kota dapat mencapai Rp14.000. Ibu Inggar Kafiar juga menilai kontribusi harian di Pasar Obor tidak memberatkan jika dibandingkan dengan biaya transportasi menuju pasar kota (Wawancara dengan Ibu Angelina Burdham dan Ibu Inggar Kafiar, 26 Mei 2026). Keberadaan lapak mengurangi sebagian hambatan akses dan menyediakan ruang pemasaran yang lebih dekat. Meskipun demikian, fasilitas fisik baru memberi manfaat ketika didukung permintaan konsumen, kondisi lingkungan yang layak, dan kemampuan pedagang memanfaatkannya secara konsisten.

Potensi kebun jemaat dan solidaritas antarrayon juga menjadi sumber daya yang mendukung program. Hasil kebun menyediakan komoditas yang dapat dijual, sementara pembangunan lapak melalui sumbangan dana, material, dan tenaga dari 14 rayon menunjukkan kemampuan kolektif jemaat dalam menyediakan sarana usaha. Kondisi ini sejalan dengan Oagai et al. (2024), yang menempatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, serta prasarana pemasaran sebagai unsur yang saling melengkapi dalam pemberdayaan ekonomi. Solidaritas tersebut juga tercermin dalam hubungan antarpedagang yang saling membantu menjualkan dagangan ketika terdapat pedagang yang kehabisan atau masih memiliki sisa produk. Ibu Jamamona menyampaikan bahwa kegiatan berjualan memperluas relasi dengan jemaat dari rayon lain, sedangkan ketua lapak menjelaskan bahwa bantuan antarpedagang dapat terjadi dalam kegiatan sehari-hari (Wawancara dengan Ibu Jamamona dan Ibu Anigreth Malibela, 21 dan 26 September 2026).

Dukungan tersebut diperkuat oleh kesempatan memperoleh pesanan pada kegiatan gerejawi. Informan menjelaskan bahwa pesanan makanan untuk kegiatan tertentu dapat mencapai ribuan porsi, sedangkan pesanan dalam kegiatan kedukaan dapat mencapai sekitar 500 porsi (Wawancara dengan Ibu Hamni Bolota, Ibu Anna Maulete, dan Ibu Ester Elkaratan, 27 Mei 2026). Pesanan ini membuka saluran pemasaran di luar penjualan harian, meskipun berlangsung pada acara tertentu dan tidak dapat dianggap sebagai permintaan yang tersedia secara rutin. Potensi tersebut menunjukkan bahwa jaringan gereja dapat membantu mempertemukan produk pedagang dengan konsumen. Oleh karena itu, kekuatan Pasar Obor tidak hanya terletak pada lokasi dan sarana, tetapi juga pada sumber daya lokal, solidaritas, dan jaringan sosial yang dapat dikembangkan menjadi dukungan pemasaran yang lebih terencana.

Faktor penghambat

Kendala yang paling terlihat adalah ketidakkonsistenan sebagian peserta dalam menjalankan kegiatan berjualan. Ketua PHMJ memperkirakan sekitar 60 orang terdaftar, sementara pedagang yang rutin berjualan hanya sekitar 10 orang. Pada tahap awal, sekitar 17 penerima diakonia menyatakan kesediaan mengikuti program. Angka-angka tersebut merujuk pada tahapan dan cakupan peserta yang berbeda, tetapi secara keseluruhan menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi partisipasi dan pemanfaatan lapak secara rutin. Pedagang menyebut dagangan yang tidak selalu habis, kelelahan, dan alasan pribadi sebagai beberapa penyebab berkurangnya aktivitas berjualan, sedangkan pimpinan gereja juga menyoroti perlunya penguatan pemahaman mengenai modal dan keuntungan (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, 29 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Martina, 27 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Korokay, 21 September 2026).

Kondisi tersebut tidak tepat dijelaskan hanya sebagai persoalan motivasi atau kedisiplinan peserta. Rendahnya permintaan, ketidakpastian penjualan, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan dagangan turut memengaruhi keputusan untuk terus berjualan. Dalam kerangka Oagai et al. (2024), akses terhadap pasar dan permintaan

merupakan unsur penting yang menentukan apakah sumber daya produktif dapat menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, pengelolaan perlu mengidentifikasi penyebab berkurangnya aktivitas setiap peserta dan membedakan persoalan kemampuan usaha dari persoalan permintaan atau fasilitas. Dengan cara tersebut, tindak lanjut dapat diarahkan pada kebutuhan yang tepat, baik berupa penyesuaian jumlah produksi, pendampingan keuangan, maupun pengembangan pemasaran.

Pembinaan usaha yang belum formal dan sistematis menjadi kendala berikutnya. Arahan dari pimpinan dan ketua lapak telah diberikan, tetapi belum terdapat program pelatihan berkala yang menjangkau semua pedagang. Kebutuhan pembinaan juga berbeda menurut jenis usaha. Pedagang makanan siap santap membutuhkan kemampuan menghitung biaya bahan, mengelola sisa produk, dan menentukan jumlah produksi, sedangkan pedagang hasil kebun memerlukan pengelolaan persediaan dan penyesuaian waktu penjualan. Keterampilan pembukuan sederhana, pemisahan modal dan keuntungan, serta penentuan harga diperlukan oleh seluruh pedagang. Keterbatasan pembinaan tersebut membuat pengembangan keterampilan cenderung bergantung pada pengalaman masing-masing peserta, padahal pengalaman dan kemampuan awal pedagang tidak sama (Wawancara dengan Ibu Hamni Bolota, 27 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Jamamono dan Ibu Hohame, 21 September 2026).

Keterbatasan permintaan juga berkaitan dengan kondisi fasilitas dan cuaca. Hujan serta angin dapat merusak tenda dan payung, sedangkan lokasi yang becek dan penerangan yang kurang memadai dapat mengurangi kenyamanan berkunjung. Ibu Martina menjelaskan bahwa ketika pengunjung sepi dan cuaca buruk, produksi yang biasanya mencapai tiga sampai empat kilogram dapat menurun menjadi sekitar satu setengah hingga dua setengah kilogram (Wawancara dengan Ibu Martina, 27 Mei 2026). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan usaha bergantung pada hubungan antara kondisi lingkungan, jumlah pengunjung, dan kemampuan pedagang menyesuaikan produksi. Rencana pembangunan tempat makan permanen dengan konsep food court telah disampaikan oleh Ketua PHMJ, tetapi rencana tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fasilitas yang telah terealisasi (Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, 29 Mei 2026).

Kecukupan modal dan dokumentasi kelembagaan melengkapi hambatan tersebut. Modal awal sebesar Rp300.000 membantu penerima diakonia memulai usaha, tetapi kebutuhan modal berbeda menurut jenis dagangan dan biaya produksi. Di samping itu, ketidakjelasan status pengembalian modal dan belum lengkapnya pencatatan transaksi menyulitkan pengelola menilai jumlah dana yang telah kembali atau yang masih dapat digunakan untuk mendukung peserta lainnya. Ketiadaan pedoman teknis tertulis juga berpotensi memengaruhi kesinambungan program ketika terjadi pergantian pimpinan. Meskipun Pasar Obor telah dibahas dalam forum gereja dan didukung laporan operasional, legitimasi program tidak sepenuhnya sama dengan tersedianya prosedur kerja yang dapat digunakan secara konsisten.

Dalam perspektif manajemen, kondisi ini memperlihatkan hubungan langsung antara kelemahan dokumentasi, pembagian tanggung jawab, dan evaluasi. Nisa et al. (2022) menekankan pentingnya pengorganisasian dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi pelayanan. Pada Pasar Obor, keterbatasan pedoman tertulis tidak berarti program tidak dikelola, tetapi menunjukkan bahwa sebagian pelaksanaan masih bertumpu pada kebiasaan dan komunikasi informal. Karena itu, faktor penghambat tidak hanya berada pada tingkat peserta atau lingkungan usaha. Sebagian hambatan juga berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dalam mengubah pengalaman lapangan menjadi kebijakan, pendampingan, serta sistem evaluasi yang konsisten.

Dampak Pengelolaan Pasar Obor terhadap Pemberdayaan Ekonomi Jemaat

Dampak pengelolaan Pasar Obor terhadap pemberdayaan ekonomi jemaat tidak hanya terlihat dari tersedianya tempat berjualan, tetapi juga dari perubahan kegiatan usaha dan kemampuan sebagian pedagang dalam memanfaatkan hasil usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ibu Angelina Burdham, misalnya, menjelaskan bahwa volume dagangannya meningkat dari satu wadah menjadi dua hingga empat wadah setelah berjualan di Pasar Obor. Perkembangan usaha juga terlihat melalui penambahan variasi produk yang dijual oleh Ibu Martina dan Ibu Inggar Kafiar (Wawancara dengan Ibu Angelina Burdham, selaku pedagang diakonia, 26 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Martina, selaku pedagang non-diakonia, 27 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Inggar Kafiar, selaku pedagang non-diakonia, 26 Mei 2026). Selain penjualan harian, kegiatan gerejawi turut memberikan kesempatan memperoleh pesanan dalam jumlah besar. Ibu Hamni Bolota, Ibu Anna Maulete, dan Ibu Ester Elkaratan menyampaikan bahwa pesanan untuk kegiatan tertentu dapat mencapai ribuan porsi, sedangkan pesanan untuk kegiatan kedukaan mencapai sekitar lima ratus porsi (Wawancara dengan Ibu Hamni Bolota, Ibu Anna Maulete, dan Ibu Ester Elkaratan, selaku pedagang diakonia, 27 Mei 2026). Peluang tersebut didukung oleh keberadaan lapak yang dekat dengan jalan raya utama serta fasilitas yang memungkinkan jemaat memasarkan hasil usahanya. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya akses pasar dan ketersediaan prasarana dalam mendukung kegiatan produktif sebagaimana dijelaskan (Oagai et al., 2024). Meskipun demikian, pesanan dalam jumlah besar masih bergantung pada penyelenggaraan kegiatan tertentu sehingga belum menjamin tersedianya permintaan secara rutin.

Kesempatan usaha tersebut belum sepenuhnya menghasilkan perkembangan yang stabil bagi seluruh pedagang. Ibu Martina menjelaskan bahwa ketika pengunjung sepi dan cuaca buruk, jumlah produksi yang biasanya mencapai tiga sampai empat kilogram dapat menurun menjadi sekitar satu setengah hingga dua setengah kilogram (Wawancara dengan Ibu Martina, selaku pedagang non-diakonia, 27 Mei 2026). Penerimaan harian pedagang juga bervariasi. Ibu Angelina Burdham memperkirakan penerimaannya berkisar Rp200.000-Rp300.000, sedangkan Ibu Hamni Bolota dan Ibu Anna Maulete menyampaikan penerimaan sekitar Rp300.000 pada hari sepi dan Rp500.000-Rp600.000 pada hari ramai (Wawancara dengan Ibu Angelina Burdham, selaku pedagang diakonia, 26 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Hamni Bolota dan Ibu Anna Maulete, selaku pedagang diakonia, 27 Mei 2026). Angka tersebut merupakan penerimaan penjualan, bukan keuntungan bersih, karena masih terdapat biaya bahan baku dan kebutuhan operasional yang harus diperhitungkan. Perbedaan jumlah pengunjung dan permintaan konsumen menunjukkan bahwa akses terhadap tempat berjualan belum dengan sendirinya menjamin kestabilan pendapatan. Hal ini sejalan dengan Oagai et al. (2024) yang menekankan bahwa pengembangan kegiatan ekonomi juga berkaitan dengan kemampuan menjangkau pasar dan memenuhi permintaan konsumen.

Di samping perkembangan penjualan, sebagian pedagang mulai memperlihatkan kemampuan mengatur hasil usaha secara lebih mandiri. Ibu Angelina Burdham menyisihkan hasil penjualan ke dalam celengan, Ibu Martina mencatat penjualan harian dan membagi hasil usaha untuk kebutuhan tertentu, sedangkan Ibu Inggar Kafiar memisahkan modal yang akan diputar kembali dari keuntungan melalui dompet digital. Ibu Jamamono juga menerapkan pembukuan sederhana dalam kegiatan usahanya (Wawancara dengan Ibu Angelina Burdham, 26 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Martina, 27 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Inggar Kafiar, 26 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Jamamono, 21 September 2026). Hasil usaha tersebut turut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, antara lain membayar uang muka sepeda motor sebesar Rp3.300.000, membantu biaya pendidikan anak, dan membayar cicilan (Wawancara dengan Ibu Angelina Burdham, 26 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Hamni Bolota, 27 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Martina, 27 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Inggar Kafiar, 26 Mei 2026).

Ibu Angelina juga menyampaikan bahwa dirinya tidak lagi sepenuhnya menunggu penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara Ibu Korokay dapat ikut

menanggung kebutuhan ekonomi bersama suami yang telah pensiun (Wawancara dengan Ibu Angelina Burdham, 26 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Korokay, 21 September 2026). Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan usaha mulai memberikan ruang bagi sebagian jemaat untuk mengambil peran lebih besar dalam menentukan dan memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam perspektif Suharto (2014), keadaan ini berkaitan dengan penguatan keberdayaan, terutama kemampuan individu memanfaatkan sumber daya produktif, meningkatkan pendapatan, dan mengembangkan kapasitas untuk menentukan kehidupan yang lebih baik. Namun, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata. Ibu Dongeubun masih menilai bahwa modal awal yang diterima belum menghasilkan keuntungan yang memadai (Wawancara dengan Ibu Dongeubun, 21 September 2026). Dengan demikian, Pasar Obor telah membuka kesempatan bagi perkembangan usaha, tetapi keberlanjutan dan tingkat kemandirian ekonomi peserta masih dipengaruhi oleh kecukupan modal, kemampuan mengelola usaha, serta kondisi permintaan pasar (Oagai et al., 2024; Suharto, 2014).

Selain memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi, keterbukaan Pasar Obor bagi jemaat dari berbagai rayon telah membentuk ruang interaksi yang memperluas hubungan antarpedagang. Ibu Jamamono, yang berasal dari Rayon 2, menjelaskan bahwa melalui kegiatan berjualan di Pasar Obor dirinya menjadi lebih mengenal warga dari Rayon 7, 8, dan 10. Ibu Martina juga menyampaikan bahwa para pedagang sering berbagi cerita mengenai kegiatan pelayanan di rayon masing-masing dan menjadikan lapak sebagai tempat berdialog ketika menghadapi persoalan (Wawancara dengan Ibu Jamamono, selaku pedagang non-diakonia, 21 September 2026; Wawancara dengan Ibu Martina, selaku pedagang non-diakonia, 27 Mei 2026).

Hubungan tersebut tidak berhenti pada saling mengenal, tetapi turut membentuk kebiasaan untuk saling mendukung dalam kegiatan usaha. Ibu Hohame menyatakan bahwa para pedagang tidak memandang satu sama lain sebagai pesaing karena semuanya merupakan satu jemaat. Hal serupa disampaikan Ibu Angelina Burdham yang melihat bahwa ketika pembeli berbelanja di satu lapak, pedagang lain dapat menerima keadaan tersebut tanpa harus merasa dirugikan karena setiap orang memiliki kesempatan memperoleh berkat melalui usaha masing-masing (Wawancara dengan Ibu Hohame, selaku pedagang diakonia, 21 September 2026; Wawancara dengan Ibu Angelina Burdham, selaku pedagang diakonia, 26 Mei 2026). Meskipun persaingan sesekali tetap terjadi, Ketua Lapak, Ibu Anigreth Malibela, berperan sebagai pihak netral yang membantu menyelesaikan kesalahpahaman agar hubungan kekeluargaan tetap terpelihara (Wawancara dengan Ibu Anigreth Malibela, selaku Ketua Lapak, 26 Mei 2026; Wawancara dengan informan penerima diakonia, 27 Mei 2026).

Hubungan kolektif tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan yang berlangsung melalui Pasar Obor tidak hanya menyangkut kemampuan individu dalam mengembangkan usaha, tetapi juga kemampuan membangun kekuatan bersama. Dalam konsep pemberdayaan Suharto (2014), keadaan ini dapat dipahami melalui *power with*, yaitu kekuatan yang tumbuh melalui kerja sama, solidaritas, dan hubungan kolektif. Temuan tersebut juga berdekatan dengan dimensi *conviviality* dalam diakonia transformatif, yang menekankan pentingnya membangun kehidupan bersama secara inklusif di tengah perbedaan (Ampony et al., 2021; Siregar & Siagian, 2025). Dalam kehidupan gereja, hubungan tersebut memiliki makna yang lebih luas karena perjumpaan antarpedagang dari berbagai rayon menjadi ruang untuk mempererat persekutuan sebagai satu tubuh Kristus.

Melalui *koinonia*, gereja dipahami sebagai persekutuan orang percaya yang saling terhubung dan membangun kehidupan bersama, sedangkan *diakonia* merupakan perwujudan pelayanan yang hadir untuk menjawab pergumulan nyata umat (Suwul, 2024). Oleh karena itu, Pasar Obor dapat dipahami sebagai salah satu ruang tempat nilai persekutuan dan pelayanan gereja diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalamnya bukan sekadar pertukaran barang dan uang, melainkan juga menjadi kesempatan untuk saling mengenal, memperhatikan, membantu, dan memelihara hubungan sebagai sesama

anggota jemaat. Dalam pengertian ini, kehadiran Kristus tidak hanya disaksikan melalui aktivitas peribadahan di gedung gereja, tetapi juga dapat dihayati melalui tindakan kasih, kepedulian, dan kebersamaan yang diwujudkan gereja dalam ruang-ruang kehidupan ekonomi umatnya. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan bahwa gereja dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah secara konkret di tengah kehidupan masyarakat serta meneladani pelayanan Yesus melalui tindakan nyata bagi sesama (Ampony et al., 2021; Setiawan & Harita, 2022; Simorangkir & Siagian, 2025).

Pengalaman menjalankan usaha juga berkaitan dengan perubahan cara sebagian pedagang memaknai berkat dan tanggung jawab dalam kehidupan iman. Ibu Hohame menyampaikan bahwa setelah memperoleh penghasilan dari kegiatan berjualan, dirinya mulai berusaha memberikan persembahan yang sebelumnya sering tidak dapat dilakukan. Ibu Hamni Bolota menjelaskan bahwa persembahan yang diberikan meningkat dari sekitar Rp 2.000-Rp 5.000 menjadi Rp10.000-Rp 15.000, sedangkan Ibu Martina menyisihkan persembahan syukur setiap bulan dalam amplop terpisah (Wawancara dengan Ibu Hohame, selaku pedagang diakonia, 21 September 2026; Wawancara dengan Ibu Hamni Bolota, selaku pedagang diakonia, 27 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Martina, selaku pedagang non-diakonia, 27 Mei 2026). Ibu Jamamono juga merasakan adanya peningkatan semangat untuk memberi sebagai ungkapan syukur atas hasil usaha yang diperoleh (Wawancara dengan Ibu Jamamono, selaku pedagang non-diakonia, 21 September 2026). Temuan ini memperlihatkan bahwa bagi sebagian jemaat, kesempatan memperoleh penghasilan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga membuka kemampuan untuk berpartisipasi dalam menopang pelayanan gereja. Kegiatan ekonomi dengan demikian dapat berjalan berdampingan dengan praktik iman, ketika hasil usaha tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga dihayati sebagai berkat yang dapat dibagikan melalui persembahan dan pelayanan. Makna tersebut sejalan dengan pemahaman diakonia sebagai tindakan konkret yang berangkat dari respons iman dan keteladanan pelayanan Kristus bagi sesama (Setiawan & Harita, 2022; Siregar & Siagian, 2025).

Selain itu, aturan bahwa pedagang tidak diperbolehkan berjualan pada waktu ibadah menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tetap ditempatkan dalam penghormatan terhadap kehidupan peribadahan jemaat (Wawancara dengan Ibu Latunussa, selaku pedagang non-diakonia, 21 September 2026). Namun, perubahan semangat memberi tersebut perlu dipahami sebagai pengalaman sebagian pedagang, bukan sebagai bukti bahwa Pasar Obor menjadi penyebab langsung peningkatan kehadiran ibadah jemaat. Dokumen sidang jemaat menunjukkan bahwa perkembangan kehadiran ibadah telah berlangsung sebelum Pasar Obor mulai beroperasi pada Maret 2025 (Hasil Sidang Jemaat ke-XXVIII, 23 November 2024). Makna pelayanan tersebut juga tercermin dalam tanggung jawab pedagang menjaga kebersihan tempat berjualan dan kualitas makanan yang ditawarkan. Ketua Lapak, Ibu Anigreth Malibela, mengarahkan pedagang untuk menjaga kebersihan karena kondisi tempat berjualan turut memengaruhi penilaian pembeli terhadap makanan. Ibu Angelina Burdham menyadari bahwa tempat yang kotor dapat membuat pembeli enggan datang, sedangkan Ibu Martina membersihkan meja sebelum berjualan dan Ibu Hohame merapikan lapak setelah kegiatan berjualan selesai.

Pengelolaan sampah juga dilakukan oleh masing-masing pedagang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan tempat usaha (Wawancara dengan Ibu Anigreth Malibela, selaku Ketua Lapak, 26 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Angelina Burdham, selaku pedagang diakonia, 26 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Martina, selaku pedagang non-diakonia, 27 Mei 2026; Wawancara dengan Ibu Hohame, selaku pedagang diakonia, 21 September 2026; Wawancara dengan Ibu Latunussa, selaku pedagang non-diakonia, 21 September 2026). Ketentuan tersebut bukan sekadar aturan teknis untuk menciptakan kerapian, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab pedagang terhadap sesama yang membeli dan

mengonsumsi produk yang dijual serta terhadap ruang bersama yang digunakan untuk mencari penghidupan.

Dalam kaitannya dengan pelayanan gereja, menjaga kebersihan dan kualitas makanan dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian (*care*) karena pelayanan tidak hanya diwujudkan melalui pemberian bantuan ekonomi, tetapi juga melalui perhatian terhadap kenyamanan, kepercayaan, dan kesejahteraan sesama (Ampony et al., 2021). Dari sisi pengelolaan, pengarahan dan pengawasan terhadap kebersihan menunjukkan bahwa aturan operasional berperan menjaga kegiatan usaha tetap berjalan sesuai tujuan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan (Terry, 1953). Dengan demikian, tanggung jawab terhadap lingkungan usaha menjadi bagian dari praktik pelayanan yang menghargai orang lain, bukan sekadar kewajiban yang harus dipatuhi pedagang.

Secara keseluruhan, dampak pengelolaan Pasar Obor memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi jemaat memiliki makna yang lebih luas daripada peningkatan kegiatan penjualan. Pasar Obor telah membuka kesempatan bagi sebagian jemaat untuk mengembangkan usaha, mengatur hasil pendapatan, dan ikut memenuhi kebutuhan keluarga. Pada saat yang sama, keterbukaan pasar bagi jemaat lintas rayon membangun ruang perjumpaan yang memperkuat solidaritas dan persekutuan, sementara praktik memberi, penghormatan terhadap waktu ibadah, serta kepedulian terhadap kebersihan memperlihatkan keterhubungan antara kegiatan ekonomi dan penghayatan iman. Meskipun demikian, dampak tersebut belum berlangsung secara merata dan belum sepenuhnya terukur karena masih terdapat pedagang yang menghadapi keterbatasan modal, permintaan yang tidak stabil, serta belum tersedianya pencatatan perkembangan ekonomi peserta secara sistematis (Wawancara dengan Ibu Dongeubun, 21 September 2026; Wawancara dengan Pdt. Yohanis Sattu, selaku Ketua PHMJ, 29 Mei 2026). Oleh sebab itu, makna penting Pasar Obor terletak pada terbukanya ruang bagi gereja untuk menghadirkan pelayanan secara nyata dalam kehidupan ekonomi jemaat: bukan hanya dengan menyediakan sarana usaha, tetapi juga dengan membangun kemandirian, merawat persekutuan, dan mewujudkan kasih Kristus melalui relasi serta tanggung jawab sehari-hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan Pasar Obor di GKI Ekklesia Klasaman telah dilaksanakan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan melibatkan PHMJ, Urusan PKK, Ekubang, serta dukungan 14 rayon dalam penyediaan sekitar 20 lapak. Pengelolaan ini didukung oleh keterlibatan pimpinan gereja, lokasi yang strategis, potensi sumber daya lokal, dan solidaritas jemaat, tetapi masih menghadapi kendala berupa rendahnya konsistensi sebagian pedagang, permintaan konsumen yang tidak stabil, keterbatasan modal dan pendampingan, serta belum optimalnya pedoman dan evaluasi pengelolaan. Pasar Obor telah memberikan kesempatan bagi sebagian jemaat untuk mengembangkan usaha, memperoleh pendapatan, dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, pasar menjadi ruang perjumpaan lintas rayon yang memperkuat solidaritas dan persekutuan jemaat serta menghadirkan praktik diakonia dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui pelayanan gereja tidak cukup dilakukan dengan menyediakan fasilitas usaha, tetapi perlu disertai penguatan kapasitas, pendampingan, akses pasar, dan partisipasi peserta agar manfaatnya lebih merata dan berkelanjutan. Penelitian ini terbatas pada satu studi kasus dan belum didukung pencatatan keuangan usaha yang sistematis, sehingga dampak ekonomi belum dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu, pengelola perlu memperjelas struktur dan pedoman operasional, meningkatkan pelatihan serta pendampingan usaha, memperluas jaringan pemasaran, dan melakukan evaluasi berdasarkan perkembangan usaha peserta. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang dengan melibatkan pedagang aktif maupun yang telah berhenti berjualan serta

menggunakan data keuangan usaha untuk menelaah perkembangan ekonomi dan keberlanjutan program secara lebih mendalam.

Kontribusi Author

Seluruh penulis berkontribusi secara signifikan terhadap penelitian ini. Kontribusi meliputi konseptualisasi penelitian, penyusunan kerangka teori, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, penulisan naskah, revisi ilmiah, serta persetujuan akhir terhadap naskah yang akan dipublikasikan. Seluruh penulis menyatakan telah membaca dan menyetujui versi final artikel.

AI Disclosure Statement

Selama penyusunan naskah ini, penulis Penulis menyatakan bahwa naskah penelitian ini disiapkan, diteliti, ditulis, dan disunting secara mandiri tanpa menggunakan bantuan teknologi atau teknik kecerdasan buatan (AI).

REFERENSI

Ampony, G., Büscher, M., Hofmann, B., Ngnintedem, F., Solon, D., & Werner, D. (2021). International Handbook On Mega-Projects. In *International Handbook On Mega-Projects*. Https://Doi.Org/10.4337/9781781002308

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten_Kota , 2025*.

Badan Pusat Statistik Kota Sorong. (2025). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Sorong 2025: Vol. Ix*. Badan Pusat Statistik Kota Sorong.

Badan Pusat Statistik Kota Sorong. (2026). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Sorong 2021-2025* (Vol. 10). Badan Pusat Statistik Kota Sorong.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. (2025). *Profil Kemiskinan Provinsi Papua Barat Daya Maret 2025*. *101*, 1–12.

Dame Fitri Simamora, Hartati Sepriani Gultom, J. S. A., Padang, S. A., Simanjuntak, S. N., Simare-Mare, Y., & Pasaribu, A. G. (2022). Pelayanan Diakonia Yang Transformatif. *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, *1*(4), 374–382.

Dewi, K., & Suryadi, N. (2025). Keseimbangan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Sebagai Strategi Maksimisasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *9*(2), 16089–16096.

Erlangga, D., Chaerul, A., & Syahid, A. (2023). Implementasi Konsep Planning, Organizing, Actuating, Controlling Dalam Pengelolaan Program Kursus Mengemudi 1dimas. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah E-Plus*, *8*(1), 59–68.

Fergie, M., & Irwanto, F. (2026). Manajemen Program Pelayanan Gereja : *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, *7*(2), 260–275. Https://Doi.Org/10.55626/Jti.V2i2.28.2

Frebin Thea Rona, & Lestari, M. (2025). Pengembangan Ekonomi Jemaat Melalui Revitalisasi Aset Gereja: Studi Kasus Retreat Centre Gbkp. *Management And Sustainable Development Journal*, *7*(1), 57–72. Https://Doi.Org/10.46229/Msdj.V7i1.1012

Horvat, T. (2020). *Selected Aspects Of Non-Profit Organisations*. Intechopen.

Ika, G., Naukoko, A. T., & Mandeij, D. (2022). Analisis Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tana Toraja. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, *22*(6), 13–24.

Leuhery, F., Amalo, F., Cakranegara, P. A., & Raden Rara Ayu Widaningsih, K. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sebagai Upaya Pengentaskan Kemiskinan. *Communnity Development Journal*, *4*(4), 8273–8277.

Nisa, F., Fatmawati, R., & Darmayanti, R. P. (2022). Fungsi Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan Dalam Yayasan Rehabilitasi Pecandu Napza "Sahabat Foundation." *Kais: Kajian Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah*

Jakarta Fungsi, *3*(2), 72–81.

Nyortetma, D., Salindeho, S. A., Bambung, C., Papehasen, C., Amping, E., Mangintiu, M., Inaku, R., Manggiwu, S., Biala, T., Binilang, Y., Hender, S., & Piandatu, N. (2024). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Sebagai Aksi Pastoral Gereja Institut Agama Kristen Negeri Manado. *Hospitalitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 34–43.

Oagai, A., Payage, N., & Rasinus, R. (2024). Peran Majelis Gereja Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Jemaat Gkii Smirna Tulem. *Journal Of Knowledge And Collaboration*, *1*(5), 245–252. Https://Doi.Org/10.59613/Hrd7ep60

Pandu, I. (2024). Diakonia: Suatu Kajian Ekklesiologi Imanuela Pandu. *Scholars: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan Diakonia:*, *2*(1), 77–85.

R.Terry, G., & Rue, L. . (2019). *Dasar-Dasar Manajemen* (I). Bumi Aksara.

Sarpin, Ridwan, H., Roslan, S., & Tanzil. (2025). Kerentanan Sosial Dan Kemiskinan Multidimensi Rumah Tangga Miskin. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosal*, *6*(2), 205–218.

Setiawan, D., & Harita, N. (2022). Berbagai Bentuk Pelayanan Diakonia Transformatif: Sebuah Jembatan Misi Perintisan Jemaat Kepada Kaum Miskin Di Indonesia. *Kamasean: Jurnal Teologi Kristen*, *3*(2), 123–140. Https://Doi.Org/10.34307/Kamasean.V3i2.86

Sihite, E. A., Ginting, R. O., & Sasta Panjaitan. (2026). Eklesiologi Dan Panggilan Gereja Di Tengah Perkembangan Zaman. *Sabar : Jurnal Pendidikan Agama Kristen Dan Katolik*, *3*(1), 46–54. Https://Doi.Org/10.61132/Sabar.V3i1.1648

Silitonga, P. (2023). Peran Gereja Terhadap Ekonomi Jemaat Dan Upaya Gereja Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Jemaat. *Pediaqu:Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, *2 (4)*, 12216–12225. Http://Publications.Lib.Chalmers.Se/Records/Fulltext/245180/245180.Pdf%0ahttps://Hdl.Handle.Net/20.500.12380/245180%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Jsames.2011.03.003%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Gr.2017.08.001%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Precamres.2014.12

Simorangkir, G., & Siagian, R. J. (2025). Eksistensi Gereja Sebagai Tubuh Kristus Di Era Globalisasi. *Jurnal Iso: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *6*(1), 14. Https://Doi.Org/10.53697/Iso.V6i1.3188

Siregar, C., & Siagian, R. J. (2025). Diakonia Transformatif Dalam Gereja Hkbp: Telaah Teologis Dan Kontekstual. *Murai: Jurnal Papua Teologi Konstekstual*, *6*(2), 109–117. Https://Doi.Org/10.58983/Jmurai.V6i2.190

Sitaniapessy, D. A., & Nganji, M. U. (2025). Peran Gereja Dalam Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Melalui Pertanian : Studi Pada Gks Jemaat Pamalar " The Role Of The Church In Congregational Economic Empowerment Through Agriculture : A Study On Gks Jemaat Pamalar ". *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, *11*(2), 2347–2352.

Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (S. Aep Gunarsa (Ed.); Cetakan Ke). Pt. Refika Aditama. Https://Id.Scribd.Com/Document/506402997/Membangun-Masyarakat-Memberdayakan-Rakyat

Suwul, K. (2024). Strategi Gereja Dalam Membangun Umat Allah. *Jurnal Magistra*, *Vol. 2*(2), 92–100.

Terry, G. R. (1953). *Principles Of Management*. Richard D. Irwin, Inc.

Tobing, D. L., & Saputra, Y. N. (2025). Landasan Teologis Manajemen Dalam Gereja : Fondasi Pelayanan Yang Efektif Dan Berintegritas. *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, *7*(1), 104–118. Https://Doi.Org/10.55076/Didache.V7i1.495

Ummah, F. Z. (2024). Mengatasi Kemiskinan: Memahami Akar Masalah, Tantangan Global, Dan Solusi Berkelajutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Maliki*

Interdisciplinary Journal (Mij) Eissn, *2*(11), 685–695. Http://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Mij/Index

Yurianta, I. W. D., Junaedi, I. W. R., Trimurti, C. P., & Utama, I. G. B. R. (2025). The Role Of The Church In Building The Economy Of The Congregation Members Of The Protestant Christian Church In Bali (Case Study At The Protestant Christian Church In Bali). *The Es Economics And Entrepreneurship*, *4*(01), 93–107. Https://Doi.Org/10.58812/Esee.V4i01.701